

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan uraikan pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan bab sebelumnya, yakni bab yang membahas hasil penelitian. Pada bab sebelumnya peneliti sudah melakukan berbagai macam uji untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini memiliki empat variabel bebas yang diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Keempat variabel bebas itu adalah UMK, PDRB, Investasi dan APBD, sedangkan variabel terikatnya ialah Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Untuk menjawab hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan alat uji statistik Eviews 9. Sehingga menghasilkan bahwasanya penelitian ini memakai metode analisis regresi data panel berdasarkan *Fixed Effect Model*.

#### **A. Pengaruh Variabel Bebas UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terhadap Variabel Terikat Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Secara Parsial**

Berdasarkan dari hasil pengujian data analisis uji t, secara parsial diperoleh kesimpulan bahwasanya variabel UMK mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Juga, dari hasil pengujian data diperoleh skor koefisien UMK yang menunjukkan tanda positif. Sehingga setiap kenaikan UMK akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat

Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi UMK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020. Dimana positif signifikan tersebut ditunjukkan dengan hasil skor *t-Statistic* Variabel UMK 4.529848 yang menunjukkan positif, dan juga didapati bahwa nilai probabilitas pada variabel UMK ( $X_1$ ) sebesar 0.0000. Kemudian, nilai probabilitas variabel UMK tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ), berarti signifikan. Lebih lengkapnya berikut adalah tabelnya:

**Tabel 5.1**  
**Hasil Signifikansi Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	347655.4	15734.06	22.09572	0.0000
X1UMK	0.020483	0.004522	4.529848	0.0000
X2PDRB	2.561222	0.399781	6.406563	0.0000
X3INV	-0.008849	0.001886	-4.692495	0.0000
X4APBD	2.36E-08	9.40E-09	2.508189	0.0132

**Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 9**

Upah merupakan salah satu hal yang mendorong atau memotivasi karyawan untuk bekerja atau mengabdikan secara menyeluruh terhadap perusahaan.<sup>159</sup> Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mulyadi yang mengemukakan bahwa, upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).<sup>160</sup> Pendapat lain tentang upah diungkapkan oleh Diana dan Setiawati yang mendefinisikan bahwa, upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit produk

<sup>159</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, ..., hlm. 307

<sup>160</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, ..., hlm. 373

yang dihasilkan.<sup>161</sup> Dalam Ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency-wage*). Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi.<sup>162</sup> Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.<sup>163</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Upah Minimum yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan keadaan.<sup>164</sup> Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.<sup>165</sup> Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

---

<sup>161</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Proses dan Penerapan*, ..., hlm.174.

<sup>162</sup> N. Georgy Mankew, *Makro Ekonomi*, ..., hlm. 165

<sup>163</sup> Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, ..., hlm. 226

<sup>164</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, ..., hlm. 90

<sup>165</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU NO 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan*, ..., hlm. 91

Menurut Ricardo nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami (*natural wage*). Sedangkan menurut Mankiw Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa.<sup>166</sup>

Menurut Simanjutak dimana kenaikan upah minimum akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perusahaan, karena perusahaan akan cenderung mempekerjakan tenaga kerja dengan pendidikan dan produktivitas yang tinggi dengan tingkat upah yang tinggi pula. Kaitannya adalah dengan produktivitas tenaga kerja tersebut, perusahaan akan merasa kurang diuntungkan karena produktivitas rendah dari tenaga kerja dari tenaga kerja berpendidikan rendah namun harus diberi upah tinggi akan kebijakan upah minimum. Maka pilihanya perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang berpendidikan rendah yang kemudian disubsitusikan dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Hal ini juga didukung oleh Ginding dan Terrell, yang menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan upah minimum, diprediksi akan

---

<sup>166</sup> Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ...", hlm. 199

menyebabkan peningkatan jam kerja dari pekerja yang tetap bekerja (biasanya pekerja dengan keahlian tinggi) yang mengakibatkan penurunan jumlah pekerja terampil rendah. Jam kerja dari pekerja dengan keahlian tinggi akan bertambah akibat kenaikan upah minimum, hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mengkompensasi pengurangan jumlah pekerja akibat kenaikan upah minimum, kondisi ini dikenal sebagai efek substitusi antara jam kerja dengan pekerja.<sup>167</sup>

Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dari penelitian terdahulu yakni dari Savitri dkk (2019)<sup>168</sup>. Dimana ia menyatakan bahwa variabel UMK bernilai negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Maksudnya setiap kenaikan dari UMK akan berpengaruh pada menurunnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja, begitu pula sebaliknya jika Penurunan dari UMK akan meningkatkan tingkat Penyerapan Tenaga Kerja.

Namun, Penelitian dari Indradewa dan Natha (2015)<sup>169</sup> menunjukkan hasil yang sama dari penelitian ini. Yakni upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Tidak sendiri, juga penelitian dari Putra (2012)<sup>170</sup>. Dimana secara parsial ada pengaruh positif antara variabel nilai upah dan

---

<sup>167</sup> Felber Lube, et. all, "Analisis Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bitung", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21 No. 3, 2021, hlm. 28

<sup>168</sup> Ovi Meilina Tyas Savitri, et. all., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", ..., hlm. 59

<sup>169</sup> I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, "Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali", ..., hlm. 923

<sup>170</sup> Riky Eka Putra, "Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang", ..., hlm. 42

variabel penyerapan tenaga kerja industri mebel di kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Tidak ketinggalan juga hasil penelitian dari Pangastuti (2015)<sup>171</sup> dimana pengaruh UMK dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif. Sehingga ketika UMK meningkat maka tingkat Penyerapan Tenaga Kerja akan ikut meningkat juga, begitu pula sebaliknya jika UMK turun maka Penyerapan Tenaga Kerja akan ikut turun.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa di antara UMK dan tingkat Penyerapan Tenaga Kerja mempunyai hubungan yang positif, dalam artian ketika UMK mengalami penurunan maka tingkat Penyerapan Tenaga Kerja akan ikut mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut tentunya dapat membuat pihak dari perusahaan lebih efisien, seperti yang dinyatakan oleh Karl E. Case dan Ray C. Fair yang menyebutkan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.<sup>172</sup>

#### **B. Pengaruh Variabel Bebas PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Variabel Terikat Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Secara Parsial**

Berdasarkan dari hasil pengujian data analisis uji t, secara parsial diperoleh kesimpulan bahwasanya variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Juga, dari hasil pengujian data diperoleh skor koefisien PDRB yang menunjukkan

---

<sup>171</sup> Yulia Pangastuti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah”, ..., hlm. 203

<sup>172</sup> Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, ..., hlm. 226

tanda positif. Sehingga setiap kenaikan PDRB akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang mendapatkan skor *t-Statistic* PDRB 6.406563 yang menunjukkan positif, dan juga didapati bahwa nilai probabilitas pada variabel PDRB ( $X_2$ ) sebesar 0.0000. Yang mana nilai probabilitas variabel PDRB tersebut kurang dari 0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ), berarti signifikan yang menunjukkan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan Tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020. Itu artinya, naiknya PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan bagitupun sebaliknya, turunnya PDRB akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu daerah, PDRB terdiri atas nilai bersih barang dan juga jasa yang telah dihasilkan melalui berbagai macam kegiatan perekonomian pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB adalah salah satu indikator yang bisa dipakai dalam mengukur suatu kondisi perekonomian pada daerah tersebut. Data PDRB bisa dihitung dengan menggunakan dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan.<sup>173</sup> PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui total nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi, sehingga nantinya dapat dilihat

---

<sup>173</sup> Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten ...*, hlm. 43

sektor mana saja yang ikut bertindak pada pembentukan perekonomian daerah. Dengan kata lain, PDRB dapat dipergunakan sebagai indikator untuk melihat besar kecilnya produksi atas barang dan jasa, baik secara dasar harga yang berlaku maupun secara dasar harga konstan.<sup>174</sup>

Boediono yang menyatakan bahwa pasar tenaga kerja hanya mengikuti yang terjadi di pasar barang, apabila output yang di produksi naik maka jumlah tenaga kerja juga akan meningkat. Oleh sebab itu permintaan barang dan jasa dalam perekonomian dapat mempengaruhi tingkat output yang harus di produksi, sehingga dengan bertambahnya jumlah barang yang di produksi akan berdampak pada penggunaan tenaga kerja. Menurut Listyaningsih, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja dengan asumsi apabila PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat, output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja.<sup>175</sup>

Dari hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, misalnya saja penelitian dari Indradewa dan Natha (2015)<sup>176</sup>, yang mana variable bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Bali

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>175</sup> Felber Lube, et. all, "Analisis Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bitung", ..., hlm. 28

<sup>176</sup> I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha, "Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali", ..., hlm. 923



periode tahun 1994-2013. Selanjutnya juga penelitian oleh Iksan dkk (2020)<sup>177</sup> dengan data time series tahun 2013-2017 dan data cross section dari 34 Provinsi Indonesia menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian dari Pangastuti (2015)<sup>178</sup> dimana faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang negative. Maksudnya ketika PDRB meningkat maka tingkat Penyerapan Tenaga Kerja akan menurun.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa di antara PDRB dan tingkat Penyerapan Tenaga Kerja mempunyai hubungan yang positif, dalam artian ketika PDRB mengalami kenaikan maka tingkat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan ikut mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya jika PDRB turun maka Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan menurun. PDRB atas dasar harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ketahun, di mana faktor

---

<sup>177</sup> Sapriansah Ali Nur Iksan, et. all., “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”, ..., hlm. 42

<sup>178</sup> Yulia Pangastuti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah”, ..., hlm. 203

perubahan harga telah dikeluarkan.<sup>179</sup> Tentunya hal tersebut harus ditelaah terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja sebagai asset sebuah perusahaan dalam menunjang produktifitas sebuah daerah.

### **C. Pengaruh Variabel Bebas Investasi terhadap Variabel Terikat Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Secara Parsial**

Berdasarkan dari hasil pengujian data analisis uji t, secara parsial diperoleh kesimpulan bahwasanya variabel Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Juga, dari hasil pengujian data diperoleh skor koefisien Investasi yang menunjukkan tanda negatif. Artinya adalah setiap kenaikan Investasi akan berpengaruh pada menurunnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi Investasi mempunyai pengaruh negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t, dimana dalam pengujian telah mendapatkan skor *t-Statistic* Investasi -4.692495 yang menunjukkan negatif, dan juga didapati bahwa skor probabilitas pada variabel Investasi ( $X_3$ ) sebesar 0.0000. Yang mana skor probabilitas variabel Investasi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ), berarti signifikan.

---

<sup>179</sup> Rudi Hartono, et.al., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”, ..., hlm. 38

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu: Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>180</sup>

Sedangkan menurut Sukirno, investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: Pertama Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Kedua, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan

---

<sup>180</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, ..., hlm. 164

menambah kapasitas produksi. Ketiga, Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>181</sup>

Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni penelitian dari Putra (2012)<sup>182</sup> yang mana disebutkan bahwa terdapat pengaruh positif nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Juga oleh Hidayah dkk (2016)<sup>183</sup> yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variable investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Namun hasil dari penelitian ini sesuai dengan Ali (2019)<sup>184</sup> yang menyebutkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga hasil penelitian dari Savitri dkk (2019)<sup>185</sup> juga mengatakan demikian, yakni variable investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini variabel Investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang negative. Maksudnya, jika Investasi meningkat

---

<sup>181</sup> Chairul Nizar, et. all., “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, ..., hlm. 3

<sup>182</sup> Riky Eka Putra, “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, ..., hlm. 42

<sup>183</sup> Wahyu Hidayah, et. all., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regonal Bruto di Kota Samarinda” ..., hlm. 138

<sup>184</sup> Muhammad Nur Ali, et. all., “Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur” 2019

<sup>185</sup> Ovi Meilina Tyas Savitri, et. all., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, ..., hlm. 59

maka tingkat penyerapan tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya jika investasi menurun maka tingkat penyerapan tenaga kerja akan naik. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan teori-teori yang ada, dimana teori teori tersebut menyebutkan sebaliknya. Dari hasil penelitian ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran jenis industry padat karya ke industry padat modal, dimana nilai investasi meningkat akan tetapi tenaga kerja menurun. Memungkinkannya penggunaan teknologi yang lebih dominan di dalam proses produksi. Sehingga meningkatnya Investasi akan mengurangi tingkat Penyerapan Tenaga Kerja.

**D. Pengaruh Variabel Bebas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap Variabel Terikat Tingkat Penyerapan Tenaga di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Secara Parsial**

Berdasarkan dari hasil pengujian data analisis uji t, secara parsial diperoleh kesimpulan bahwasanya variabel APBD mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Juga, dari hasil pengujian data diperoleh skor koefisien APBD yang menunjukkan tanda positif. Sehingga setiap kenaikan APBD akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi APBD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2020. Hal ini dikarenakan dalam penelitian telah mendapatkan

skor *t-Statistic* APBD 2.508189 yang menunjukkan positif, dan juga didapati bahwa nilai probabilitas pada variabel APBD ( $X_4$ ) sebesar 0.0132. Yang mana nilai probabilitas variabel APBD tersebut kurang dari 0,05 ( $0.0132 < 0,05$ ), berarti signifikan.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan suatu daftar yang memuat berbagai macam sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran dari suatu daerah dalam jangka waktu tertentu secara sistematis, pada umumnya memiliki periode satu tahun. APBN dan APBD memiliki kesamaan, yakni keduanya sama sama memiliki periode mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember<sup>186</sup>.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Sebagaimana tujuan penyusunan APBD di tiap tahunnya, yakni untuk mengatur pembelanjaan daerah dan pemerintah daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Hal ini dimaksudkan supaya memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi untuk ...*, hlm. 43

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 45

Secara teori, hasil dari penelitian ini sejalan dengan Todaro (2003)<sup>188</sup> dimana dia menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut ialah Pertama tentang akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan. Kesesuaian tersebut terletak pada poin pertama tentang akumulasi modal yang diatur agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pangastuti (2015)<sup>189</sup> yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya itu, hasil dari penelitian ini sejalan dengan Chodariyanti (2018)<sup>190</sup> yang mana menunjukkan bahwa APBD dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang kuat dan memiliki sifat sejalan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan APBD pemerintah Kabupaten Lamongan akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Akan tetapi hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwasanya APBD bukanlah satu-satunya faktor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

---

<sup>188</sup> Laily Chodariyanti, "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan ..., hlm. 72

<sup>189</sup> Yulia Pangastuti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah", ..., hlm. 203

<sup>190</sup> Laily Chodariyanti, "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan ..., hlm 71

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya APBD dan tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020 memiliki hubungan yang positif. Maksudnya ialah ketika APBD mengalami penurunan maka tingkat penyerapan tenaga kerja akan ikut mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya jika APBD naik maka tingkat penyerapan tenaga juga akan mengalami kenaikan.

#### **E. Pengaruh UMK, PDRB, Investasi, dan APBD Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Secara Simultan**

Pengaruh dari Variabel bebas UMK, PDRB, Investasi, dan APBD Terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur secara simultan dapat dilihat berdasarkan dari hasil Uji F di bawah ini:

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

R-squared	0.998606	Mean dependent var	702751.0
Adjusted R-squared	0.998220	S.D. dependent var	510987.1
S.E. of regression	18802.87	Sum squared resid	5.23E+10
F-statistic	2586.680	Durbin-Watson stat	2.035244
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 9**

Melihat tabel hasil Uji Simultan (Uji F) peneliti mendapatkan bahwa skor probabilitas pada *F-statistic* lebih kecil daripada alpha ( $0.000000 < 0,05$ ). Dari hasil tersebut telah mengindikasikan bahwasanya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan di antara variabel bebas pada variabel



terikat. Jadi variabel-variabel bebas secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2020.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, yakni dari Wasilaputri (2016)<sup>191</sup> dengan judul penelitian “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”. Hasilnya ialah Variabel bebas Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kemudian peneliti juga mendapatkan bahwa nilai probabilitas pada *R-Squared* sebesar 0.998606 atau 99,8%. Sedangkan skor probabilitas *Adjusted R-Squared* sebesar 0.998220 atau 99,8%. Hasil tahapan pengujian tersebut memperlihatkan bahwa 99,8% variabel bebas, yakni variabel UMK, PDRB, Investasi dan APBD memberikan kontribusinya dalam menjelaskan variabel terikat Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja. Sedangkan sisanya, yakni 0,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dipakai dalam model regresi di penelitian ini.

---

<sup>191</sup> Febryana Rizqi Wasilaputri, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014”, ..., hlm. 243